
**ANALISIS MEKANISME DAN PROSEDUR AKUNTABILITAS
KEUANGAN DALAM BELANJA MODAL PADA DINAS
SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ardi Pramana Hasibuan¹, Sahnun Rangkuti²

^{1,2} Universitas Dharmawangsa

pramanaardi.hsb24@gmail.com , sahnunrangkuti@dharmawangsa.ac.id

Article History:

Received: 22 Juni 2022

Revised: 24 Oktober 2022

Accepted: 19 Desember 2022

Keywords: *Mekanisme dan
Prosedur, Akuntabilitas
Keuangan, Belanja Modal*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses mekanisme dan prosedur akuntabilitas keuangan dalam belanja modal serta solusi cara mengatasi permasalahan tersebut yang dilaksanakan pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif untuk menggambarkan mekanisme dan prosedur akuntabilitas dalam belanja modal pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini adalah penerapan program Simda Keuangan tidak berjalan lancar disebabkan hal seperti sarana dan prasarana yang belum memadai serta pemahaman SDM yang belum optimal. Pengelolaan keuangan masih mengalami beberapa permasalahan yaitu pelatihan yang belum merata, SDM dengan keahlian akuntansi belum memadai. Hasil laporan realisasi belanja modal yang dihasilkan Simda Keuangan pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu belum terinci namun ketepatan dalam menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan keterampilan dalam problem solving dan pelaporan manual yang dilakukan pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan cukup baik*

PENDAHULUAN

Konsep akuntabilitas merupakan aspek yang akan berdampak pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik meliputi prinsip-prinsip

profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang berkualitas, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum.

Adisasmita mengatakan bahwa akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi (Adisasmita 2011). Mekanisme dan Prosedur akuntabilitas dapat didefinisikan dengan pola pikir yang berbeda-beda dari setiap instansi hingga membentuk integritas yang berbeda-beda juga.

Salah satu jenis pertanggungjawaban yang perlu diperhatikan adalah pertanggungjawaban keuangan. Alat akuntabilitas keuangan yang paling penting adalah keuangan dan transparansi pemerintah, dalam hal ini laporan tanggung jawab keuangan pemerintah mencerminkan suatu bentuk akuntabilitas. Berdasarkan Siaran Pers BPK RI (2021:1) menjelaskan bahwa “Dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Peningkatan ini didukung oleh upaya pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan aparatur melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).

Menurut Darman Syarif, Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya (Darman Syarif, 2015). Dilain sisi Budiman dan Arza sebagaimana mengutip pernyataan Djaja menyatakan bahwa Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Budiman & Arza, 2013). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan mempublikasikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik untuk mengelola keuangan daerah.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kewenangan provinsi, khususnya di bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan, kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas proses penyampaian pelaporan keuangan yang efisien, tepat waktu serta transparan dan terbukti berhasil sebagai OPD pertama menyampaikan laporan keuangan T.A 2020 secara lengkap di pemerintahan provinsi Sumatera Utara.

Sebagai implementasi kebijakan publik, selain mengembangkan kapasitas OPD, akuntabilitas juga membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas berupa keahlian (kompetensi, pengalaman dan informasi yang memadai). Dalam hubungan ini sebagaimana dikemukakan Soleha “disarankan kepada setiap SKPD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam bidang akuntansi dan pengelola keuangan negara melalui meminta bantuan tenaga akuntan dari BPKP, merekrut tenaga-tenaga akuntan, mengirinkan pejabatnya pada berbagai perguruan tinggi yang memiliki jurusan akuntansi ataupun berbagai pelatihan kedinasan mengenai administrasi keuangan negara (Soleha, 2014:33).

Dengan semakin lengkapnya sistem pengelolaan keuangan nasional dan daerah, dengan dukungan tiga paket peraturan perundang-undangan, dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, pengelolaan keuangan daerah perlahan tapi pasti akan semakin transparan dan akuntabel. Namun beberapa Pemda seperti Pemkab Nias dan Pemko Sibolga masih belum mempunyai strategi yang komprehensif, kurang optimal dalam perencanaan keperluan kompetensi dan perencanaan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masuk dalam kategori predikat pelayanan publik yang buruk versi Ombudsman RI.

Upaya OPD untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat permasalahan terkait implementasi kebijakan dalam pelatihan kebutuhan strategis dan kompetensi, adopsi IT dan sumber daya manusia (SDM), penggunaan sistem aplikasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan beberapa laporan keuangan belanja modal yang diperlukan, terinci dan berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

METODE

Lokasi dari penelitian ini adalah di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara pada bagian Subbag Keuangan dan Aset yang beralamat di Jl. Sakti Lubis No.7, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara informan. Menurut Moleong, Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong, 2015:163). Maka informan yang menjadi sumber data adalah :

1. Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
2. Bendahara Induk Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
3. Staf Subbag Keuangan dan Aset Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.

Teknik analisis datanya dilakukan dengan tiga aktivitas yaitu: 1. Reduksi data untuk

memperoleh informasi atau gambaran kondisi objek penelitian, 2. Penyajian data dan 3. *Concluding Drawing/Verification* (Sugiyono, 2013:91-99).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme & Prosedur Akuntabilitas Keuangan Belanja Modal pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

Pengadaan Barang/Jasa merupakan aktivitas buat mendapatkan Barang/Jasa oleh Departemen / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang lain yang prosesnya diawali dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya segala aktivitas untuk mendapatkan Barang/Jasa. Dalam perihal ini proses yang dijelaskan diatur dalam Peraturan Presiden RI No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

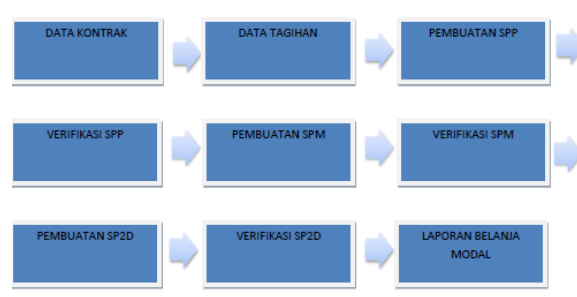
Secara universal, pengadaan diawali dari perencanaan, persiapan pengadaan, melaksanakan pengadaan (lewat swakelola ataupun pemilihan penyedia), penerapan kontrak serta serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang tercantum dalam proses di atas, di antara lain identifikasi kebutuhan, melaksanakan analisa pasar, melaksanakan kualifikasi terhadap penyedia, melaksanakan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melakukan kontrak serta melaksanakan serah terima.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kasubbag Keuangan dan Aset Bapak T. Risdani Indra Husny, S.E yang mengungkapkan bahwa : *“Akuntabilitas Keuangan Belanja Modal yang diterapkan pada Subbag Keuangan dan Aset berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dilaksanakannya Perpres terbaru ini sangat penting untuk membenahi tata kelola, menurunkan masalah korupsi dalam tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran, kebocoran dan penyimpangan yang sering terjadi dalam tender Pengadaan barang/jasa dapat dicegah atau diminimalisasi”*.

Sebelum Berkas tender / kontrak yang telah disiapkan oleh bidang atau UPTD, berkas yang dibawa ke dinas untuk diproses oleh subbag keuangan dan aset harus lengkap sesuai dengan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dan ketentuan yang berlaku. Prosedur yang diaplikasikan pada Subbag Keuangan dan Aset setelah kontrak tender telah dibuat berdasarkan yang dikemukakan oleh bapak T. Risdani Indra Husny S.E selaku Kasubbag Keuangan dan Aset yaitu :

1. Memeriksa kelengkapan berkas kontrak oleh pengelola keuangan
2. Menyiapkan surat pengantar dokumen belanja LS beserta lampiran
3. Menyiapkan nota dinas, Ceklist Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Surat Perintah Membayar (SPM-LS)

Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Belanja Modal pada Subbag Keuangan dan Aset



Gambar 1. Mekanisme Penatausahaan belanja modal pada Simda Keuangan

Dibawah ini akan dijelaskan proses Penatausahaan Belanja Modal dengan menggunakan aplikasi Simda Keuangan hingga menghasilkan laporan yang akuntabel :

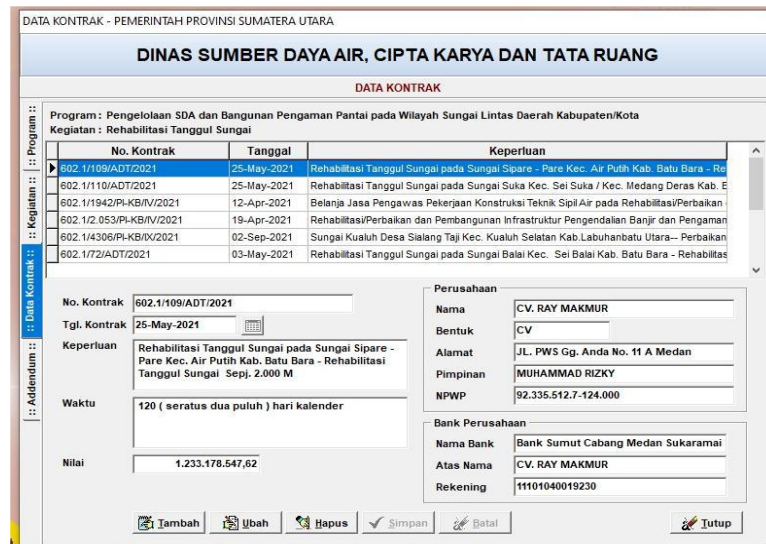
1. Data Kontrak

Setting pada komputer. Tahap awal setelah membuka aplikasinya ialah dengan menginput *user ID*, *password*, dan tahun anggaran.



Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi Simda Keuangan 2021

Lalu selanjutnya memulai tahap pengelolaan keuangan dengan memasuki bagian data kontrak. Pada bagian data kontrak diwajibkan mengisi hal – hal yang diperlukan yaitu nomor kontrak, tanggal kontrak, keperluan / uraian kontrak, waktu kontrak, nilai kontrak, nama perusahaan , bentuk perusahaan, alamat perusahaan, pimpinan perusahaan, NPWP perusahaan, No AC Bank pihak ketiga, dll. Pengisian data tersebut harus *detail* dan tidak boleh salah dalam penginputan.



DATA KONTRAK - PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DATA KONTRAK

Program : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul Sungai

No. Kontrak	Tanggal	Keperluan
602.1/109/ADT/2021	25-May-2021	Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Sipare - Pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara - Re
602.1/110/ADT/2021	25-May-2021	Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Suka Kec. Sei Suka / Kec. Medang Deras Kab. E
602.1/1942/PL-KB/IV/2021	12-Apr-2021	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air pada Rehabilitasi/Perbaikan
602.1/2.053/PL-KB/IV/2021	19-Apr-2021	Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman
602.1/4306/PL-KB/IV/2021	02-Sep-2021	Sungai Kualuh Desa Sialang Tajir Kec. Kualuh Selatan Kab.Labuhanbatu Utara-- Perbaikan
602.1/72/ADT/2021	03-May-2021	Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara - Rehabilitasi

Detail Contract 602.1/109/ADT/2021:

No. Kontrak: 602.1/109/ADT/2021
Tgl. Kontrak: 25-May-2021
Keperluan: Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Sipare - Pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara - Rehabilitasi Tanggul Sungai Sepj. 2.000 M
Waktu: 120 (seratus dua puluh) hari kalender
Nilai: 1.233.178.547,62

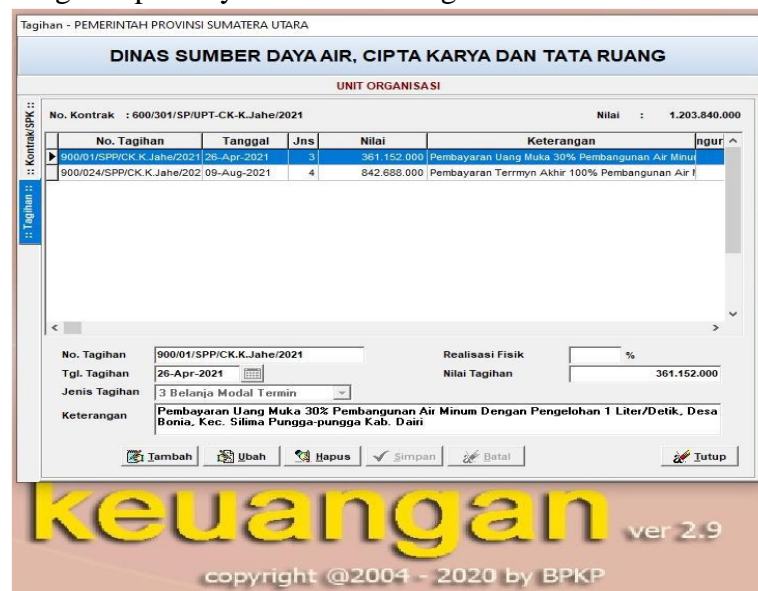
Perusahaan:
Nama: CV. RAY MAKMUR
Bentuk: CV
Alamat: JL. PWS Gg. Anda No. 11 A Medan
Pimpinan: MUHAMMAD RIZKY
NPWP: 92.335.512.7-124.000

Bank Perusahaan:
Nama Bank: Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai
Atas Nama: CV. RAY MAKMUR
Rekening: 11101040015230

Gambar 3. Contoh Formulir Pengisian Data Kontrak Simda Keuangan 2021

2. Data Tagihan

Pada bagian ini diwajibkan mengisi data berupa nomor tagihan pembayaran atau nomor SPP, tanggal tagihan atau tanggal nomor SPP, jenis tagihan pembayaran yang dapat berupa belanja operasional, uang muka, termin dan non termin, realisasi fisik pekerjaan dilapangan, uraian tagihan pembayaran dan nilai tagihan.



Tagihan - PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UNIT ORGANISASI

No. Kontrak : 600/301/SP/IPT-CK-K.Jahe/2021
Nilai : 1.203.840.000

No. Tagihan	Tanggal	Jns	Nilai	Keterangan
900/01/SPP/CK.K.Jahe/2021	26-Apr-2021	3	361.152.000	Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Air Minum
900/024/SPP/CK.K.Jahe/2021	09-Aug-2021	4	842.688.000	Pembayaran Terryn Akhir 100% Pembangunan Air f

Detail Invoice 900/01/SPP/CK.K.Jahe/2021:

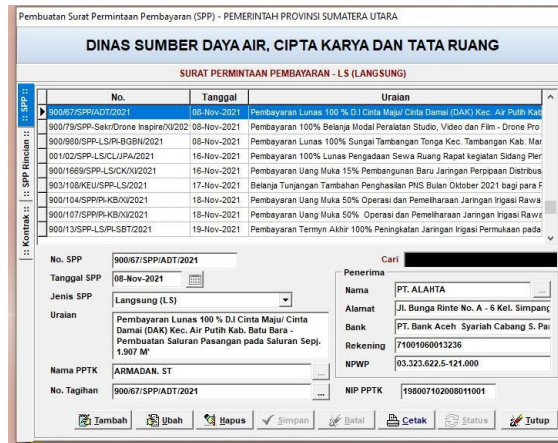
No. Tagihan: 900/01/SPP/CK.K.Jahe/2021
Tgl. Tagihan: 26-Apr-2021
Jenis Tagihan: 3 Belanja Modal Termin
Keterangan: Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Air Minum Dengan Pengolahan 1 Liter/Detik. Desa Bonia, Kec. Silima Pungga-pungga Kab. Dairi
Realisasi Fisik: %
Nilai Tagihan: 361.152.000

Gambar 4. Contoh Formulir Pengisian Data Tagihan Simda Keuangan 2021

3. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tidak dapat dicetak apabila data kontrak dan data tagihan tidak diinput maka dari itu semua proses tersebut saling berhubungan satu

dengan yang lain dan pengerjaan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Pada bagian ini diwajibkan menginput nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab atas kontrak pekerjaan tersebut.

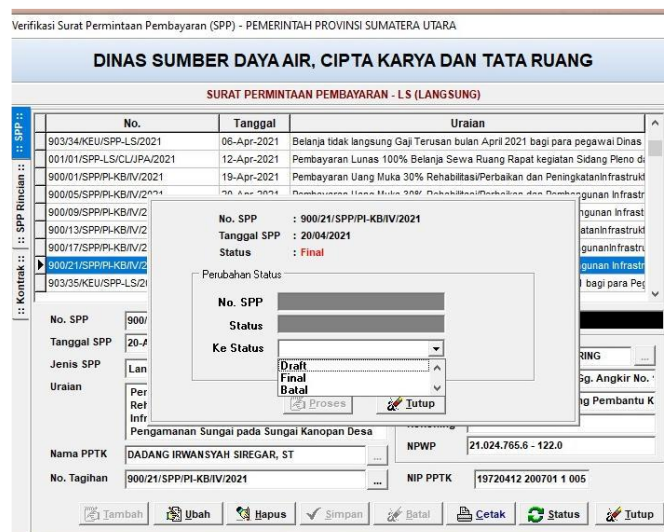


The screenshot shows the 'SURAT PERMINTA PEMBAYARAN - LS (LANGSUNG)' form. It includes a table with columns for 'No.', 'Tanggal', and 'Uraian'. Below the table, there are fields for 'No. SPP', 'Tanggal SPP', 'Jenis SPP', 'Uraian', 'Nama PPTK', and 'No. Tagihan'. On the right side, there are fields for 'Penerima', 'Nama', 'Alamat', 'Bank', 'Rekening', 'NPWP', and 'NIP PPTK'. The form also has buttons for 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Simpan', 'Batal', 'Cetak', 'Status', and 'Tutup'.

Gambar 5. Contoh Formulir Pengisian SPP-LS Simda Keuangan 2021

4. Verifikasi SPP – LS

Menurut Staf subbag keuangan dan Aset berinisial “A” mengatakan bahwa “pada bagian ini hanya mengharuskan memeriksa dan memverifikasi bahwasanya tidak ada lagi adanya kesalahan penginputan dan sudah dapat diproses lebih lanjut atau perubahan status draft ke final dan selanjutnya dapat dilakukan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS)”.



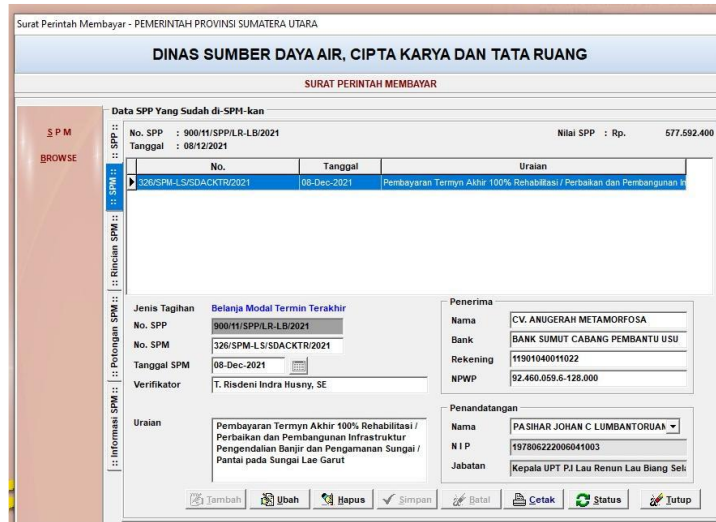
The screenshot shows the 'Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA' form. It includes a table with columns for 'No.', 'Tanggal', and 'Uraian'. Below the table, there are fields for 'No. SPP', 'Tanggal SPP', 'Status', 'Ke Status', 'Perubahan Status', 'Nama PPTK', and 'No. Tagihan'. On the right side, there are fields for 'RING', 'No. Angkir No.', and 'No. Pembantu K'. The form also has buttons for 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Simpan', 'Batal', 'Cetak', 'Status', and 'Tutup'.

Gambar 6. Contoh Halaman Verifikasi SPP-LS Simda Keuangan 2021

5. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS)

Pada bagian ini diwajibkan mengisi nomor Surat Perintah Membayar beserta tanggal terhitung sejak berkas sudah didisposisi Pengguna Anggaran/melalui sekretaris, memilih

Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan kontrak tersebut untuk ditandatangani, dan mengisi E – Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)



Data SPP Yang Sudah di-SPH-kan

No. SPP : 900/11/SPPI/LR-LB/2021 Nilai SPP : Rp. 577.592.400
 Tanggal : 08/12/2021

No.	Tanggal	Uraian
326/SPM-LS/SDACKTR/2021	08-Dec-2021	Pembayaran Termyn Akhir 100% Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan

Jenis Tagihan : Belanja Modal Termin Terakhir

No. SPM : 900/11/SPPI/LR-LB/2021
No. SPM : 326/SPM-LS/SDACKTR/2021
Tanggal SPM : 08-Dec-2021
Verifikator : T. Risdani Indra Husny, SE

Penerima

Nama : CV. ANUGERAH METAMORFOSA
 Bank : BANK SUMUT CABANG PEMBANTU USU
 Rekening : 11901040011022
 NPWP : 92.460.059.6-128.000

Penandatangan

Nama : PASHAR JOHAN C LUMBANTORUA
 N I P : 197806222006041003
 Jabatan : Kepala UPT PJ Lau Renun Lau Biang Selu

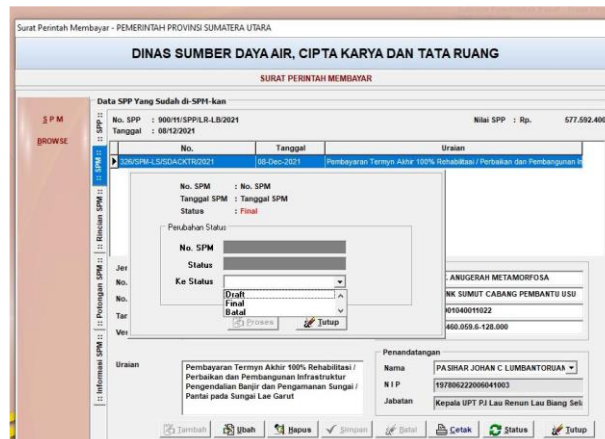
Uraian

Pembayaran Termyn Akhir 100% Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai / Pantai pada Sungai Loe Garut

Gambar 7. Contoh Halaman Pembuatan SPM-LS Simda Keuangan 2021

6. Verifikasi SPM – LS

Tidak jauh berbeda dengan verifikasi SPP-LS, hanya dengan mengubah status *draft* ke *final* dokumen sudah dapat diproses ke biro keuangan atau bagian perbendaharaan BPKAD untuk pencairan dana SP2D.



Data SPP Yang Sudah di-SPH-kan

No. SPP : 900/11/SPPI/LR-LB/2021 Nilai SPP : Rp. 577.592.400
 Tanggal : 08/12/2021

No.	Tanggal	Uraian
326/SPM-LS/SDACKTR/2021	08-Dec-2021	Pembayaran Termyn Akhir 100% Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan

No. SPM : No. SPM
Tanggal SPM : Tanggal SPM
Status : Final

Perubahan Status

No. SPM :
 Status :
 Ke Status :
 Draft
 Final
 Batal

Penerima

Nama : ANUGERAH METAMORFOSA
 NK SUMUT CABANG PEMBANTU USU
 119040011022
 92.460.059.6-128.000

Penandatangan

Nama : PASHAR JOHAN C LUMBANTORUA
 N I P : 197806222006041003
 Jabatan : Kepala UPT PJ Lau Renun Lau Biang Selu

Uraian

Pembayaran Termyn Akhir 100% Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai / Pantai pada Sungai Loe Garut

Gambar 8. Contoh Halaman Verifikasi SPM-LS Simda Keuangan 2021

7. Pembuatan dan Verifikasi SP2D

Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerima SPM-LS yang diajukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS dan apabila dianggap telah lengkap maka diterbitkan SP2D-LS rangkap 10 dan mencatat dalam Register SP2D.

8. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Untuk tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sangat dipermudah dengan adanya Simda Keuangan. Dengan hanya mengklik beberapa menu dalam aplikasi, laporan sudah bisa dilihat bahkan dicetak setelah melalui tahapan – tahapan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Awal proses penginputan data-data memang menyulitkan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf ahli keuangan terutama ketika pelaksanaan pengelolaan keuangannya, karena dalam penginputan data membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa andal. Tetapi kesulitan pada proses tersebut akan diperoleh manfaatnya ketika pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi Simda Keuangan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Jember 2, Januari s.d 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			4/ PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	405.903.823.083,37	0,00	398.609.795.096,00	398.609.795.096,00	(57.294.027.987,37)
5.1	BELANJA OPERASI	236.730.389.104,87	0,00	393.303.037.820,00	393.303.037.820,00	(234.427.351.241,87)
5.1.1	Belanja Pegawai	122.599.720.440,00	0,00	122.608.003.800,00	122.608.003.800,00	(8.909.278.400,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	114.130.668.664,87	0,00	80.697.034.020,00	80.697.034.020,00	33.433.634.644,87
5.2	BELANJA MODAL	169.173.433.978,50	0,00	155.306.757.276,00	155.306.757.276,00	(13.866.676.702,50)
5.2.3	Belanja Modal Perencanaan dan Pelaksanaan	3.036.000.000,00	0,00	3.046.260.000,00	3.046.260.000,00	(10.260.000,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Sigpal dan lainnya	166.137.433.978,50	0,00	152.260.497.276,00	152.260.497.276,00	(14.877.000.000,00)
	SIMPULAN / DEFISIT	(405.903.823.083,37)	0,00	(398.609.795.096,00)	(398.609.795.096,00)	57.294.027.987,37
	SISA LEBIH/KURANG PERHITUNGAN TAHUN BERSEKUTU	(405.903.823.083,37)	0,00	(398.609.795.096,00)	(398.609.795.096,00)	57.294.027.987,37

Gambar 9. Contoh salah satu laporan Simda Keuangan

Adopsi Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Adopsi sistem data teknologi informasi bisa jadi pendukung keunggulan untuk OPD dengan ketentuan kalau sistem data yang diadopsi merupakan sistem yang relevan untuk pemerintah serta ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang sanggup serta kompeten buat mengoperasikan sistem tersebut. Disinilah kunci dari keberhasilan sistem data teknologi informasi bermula.

Sumber daya manusia berperan penting dalam keberhasilan sistem informasi karena berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada subbag keuangan dan aset Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu ditemukan permasalahan berupa SDM yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam penggunaan sistem informasi, Kesadaran dan kemauan pegawai untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di OPD masih sangat terbatas. Kegagalan penerapan sistem informasi disebabkan oleh kurangnya kepatuhan (*compliance*), kemauan untuk belajar dari sumber daya manusia untuk menggunakan sistem informasi tersebut yang setiap tahun selalu berkembang dan kadang berganti.

Hal ini dapat dipengaruhi oleh sebagian aspek di antara lain ialah latar belakang pembelajaran yang berbeda-beda. Aspek ini jadi sangat berarti dalam pelaksanaan sistem

teknologi informasi yang diterapkan pada Subbag Keuangan dan Aset sebab tidak seluruh pegawai yang mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi. Perbandingan latar belakang pendidikan tiap pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu membuat perbandingan pula terhadap kompetensi yang dimiliki. Aspek pendidikan serta usia mempunyai pengaruh besar terhadap kompetensi yang berhubungan dengan pegawai.

Tidak hanya aspek di atas, terdapat aspek yang pula mempengaruhi minimnya kompetensi pegawai ialah aspek umur yang tidak merata. Meski tingkatan pembelajaran atau pendidikan yang dipunyai pegawai sama, namun terdapat aspek lain yang mempengaruhi keahlian pegawai ialah aspek umur. Sebagian pimpinan serta anggota yang terdapat di Subbag Keuangan dan Aset telah berusia di atas 40 tahun. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi dalam bekerja serta terus menjadi susah pula dalam pemberian pengetahuan baru terlebih 80 yang berhubungan dengan teknologi dibandingkan pegawai yang berumur 35 tahun kebawah.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah dengan sistem yang berbasis akrual, dari hasil observasi bahwasanya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu dalam perihal ini Subbag Keuangan dan Aset sudah mengkomunikasikan kepada aktor pelaksana kebijakan, lewat rapat-rapat, sosialisasi, perintah-perintah dari atasan, ataupun *mendownload* lewat internet, demikian pula pelatihan-pelatihan ialah komunikasi verbal serta nonverbal yang sangat efisien dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan berbasis akrual sebab tidak hanya mengantarkan pesan berhadapan langsung dengan para aktor lewat tulisan serta lisan (Verbal), diberikan juga dokumen berbentuk modul, gerak badan terhadap kebijakan berbasis akrual. Semacam halnya melakukan perjalanan dinas buat menyelenggarakan *Knowledge Transfer Forum* (KTF) dalam bidang akuntansi serta pelaporan kepada UPTD sehingga para bendahara pengeluaran pembantu beserta staf sudah menyadari, mempelajari serta mengenali, hendaknya jangan mengenali dan mempelajari cuma sebatas dipermukaan saja, komunikasi lewat pelatihan-pelatihan belum optimal sebab seluruh staf belum menyeluruh dan merata memperoleh pelatihan-pelatihan kompetensi, karena lumayan jelas serta konsisten perintah-perintahnya yang tertuang dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, sehabis di jalani observasi lapangan, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) belum mencukupi pada Subbag Keuangan dan Aset, baik jumlah ataupun latar belakang pendidikannya ialah dari 19 Aparatur Sipil Negara (ASN), serta 6 tenaga honorer yang terdapat cuma 11 orang yang memiliki latar belakang Sarjana Ekonomi itupun jurusan ekonomi manajemen tidak ekonomi akuntansi. Informasi pegawai membuktikan minimnya disiplin ilmu akuntansi yang dipunyai oleh Subbag Keuangan dan Aset. Pengelolaan keuangan wilayah berbasis akrual diharapkan memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi, sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), salah satu strategi yang dicoba KSAP adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi, oleh karena itu disiplin ilmu akuntansi salah satu penanda pendukung terhadap implementasi kebijakan keuangan wilayah berbasis akrual.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu yang memiliki tugas serta fungsi dalam penempatan serta mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun dalam realitanya tidak terdapat sumber daya aparatur yang memiliki latar belakang disiplin ilmu akuntansi, hal ini diakibatkan oleh kebijakan menempatkan serta mutasi sumber daya aparatur yang merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Wilayah (BKD). Serta begitu pula tentang pengadaan pegawai, kewenangan kebijakan pengadaan ASN buat pemerintah daerah yaitu sesuai dengan formasi yang diresmikan oleh Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), yang mana sepanjang ini rekrutmen CPNSD cuma tenaga guru serta kesehatan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipunyai, khususnya yang memiliki latar belakang pembelajaran pendidikan akuntansi masih kurang ataupun belum mencukupi di dalam Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan wilayah berbasis akrual pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya serta Tata Ruang Provsu, dalam hal ini, Subbag Keuangan dan Aset cuma dapat menggunakan sumber daya yang ada, yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat pembelajaran serta pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrual, serta hingga dikala ini, ASN belum seluruhnya bisa diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, sehingga butuh dilakukan pelatihan-pelatihan secara menyeluruh serta berkesinambungan buat tingkatan kompetensi pengelolaan keuangan berbasis akrual. Demikian pula jumlah staf di Subbag Keuangan serta Peninggalan belum mencukupi memiliki latar balik pembelajaran akuntansi.

Pembahasan Penerapan Program Yang Belum Optimal

Penilaian merupakan evaluasi serta revisi yang dicoba dalam sesuatu aktivitas yang sudah berlangsung ataupun dilaksanakan. Contoh aktivitas penilaian merupakan menyamakan hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas yang sudah dilaksanakan. Sebagai sebuah instansi pemerintahan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara sebaiknya melakukan penilaian terhadap penerapan Simda Keuangan yang telah digunakan dalam hal penatausahaan keuangan. Penilaian ini dilakukan untuk melihat kekurangan, kelebihan, kesalahan serta hal lain yang bisa mempengaruhi hasil laporan yang diperlukan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian mekanisme dan prosedur akuntabilitas keuangan belanja modal pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, penyajian prosedur dan mekanisme pemberkasan sudah diproses sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 yang berisi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Instrumen yang digunakan dalam Akuntabilitas Keuangan Belanja Modal yaitu dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang bernama Simda

Keuangan, E- Keuangan dan SIPD. Namun dalam dua tahun terakhir ini menggunakan Simda keuangan untuk penatausahaan keuangan dan pelaporan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak **T. Risdani Indra Husny, SE** selaku Kasubbag Keuangan dan Aset pada tanggal 15 November 2021 yang mengatakan:

“Simda Keuangan tidak dapat diakses disembarang tempat dan harus menggunakan jaringan dan IP khusus dan memerlukan username dan password khusus untuk membukanya dan mungkin inilah kelebihanannya dalam kerahasiaan data makanya tetap dipakai hingga sekarang namun tidak fleksibel karena harus mengerjakannya dikantor dan pembelajarannya tidak terlalu sulit berbeda dengan E – Keuangan dan SIPD dapat diakses di jaringan manapun dan hanya memerlukan username dan password khusus namun sejak dua tahun terakhir E – Keuangan sudah tidak digunakan lagi”.

Fitur– fitur yang terdapat dalam aplikasi Simda Keuangan diciptakan sederhana, simpel dan mudah dipahami. Artinya aplikasi Simda Keuangan ini dirancang dengan desain yang simpel tetapi senantiasa informatif serta akuntabel. Sehingga tidak hanya memudahkan pengguna, laporan yang dihasilkan oleh aplikasi juga andal. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang dilakukan, aplikasi Simda Keuangan bisa menciptakan output berbentuk dokumen penatausahaan serta laporan-laporan yang sesuai dengan syarat perundang-undangan, namun tidak pula dengan laporan belanja modal. Laporan yang dihasilkan dalam hal belanja modal tidak terinci dikarenakan Simda Keuangan dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap hasil laporan realisasi belanja modal dan beberapa keluhan dari user Simda Keuangan dari seluruh OPD Provsu. Pasalnya setiap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat meminta laporan realisasi belanja modal, laporan yang dihasilkan dari Simda Keuangan tidak dapat digunakan dikarenakan data yang diminta tidak lengkap didalam laporan tersebut.

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai hasil laporan keuangan belanja modal Simda Keuangan dari hasil wawancara dengan bapak **Usfian Zuldani Hasibuan S.T** selaku Bendahara Pengeluaran :

“Setiap BPK dan Inspektorat meminta laporan keuangan belanja modal berupa realisasi dan lain-lain, format laporan keuangan dari Simda Keuangan tidak dapat digunakan untuk diberikan kepada mereka maka dari itu mereka selalu meminta data dengan format mereka sendiri yang lebih rinci dan lengkap dan setiap saat kami harus menginput laporan keuangan belanja modal kembali yang mereka minta secara manual”.

Berdasarkan observasi aktivitas staf keuangan terhadap mekanisme dan prosedur akuntabilitas keuangan dalam hal penggunaan media yaitu ketepatan dalam menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan keterampilan dalam *problem solving* dan pelaporan pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu berjalan dengan cukup baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai Analisis Mekanisme dan Prosedur Akuntabilitas Keuangan dalam Belanja Modal pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara diketahui sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program Simda Keuangan tidak

seluruhnya berjalan mudah, terdapat sebagian permasalahan yang dialami semacam sarana dan prasarana yang belum memadai serta pemahaman SDM yang belum maksimal, 2. Pengelolaan keuangan daerah pada Subbag Keuangan dan Aset Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu terdapat permasalahan hingga kini yaitu pelatihan-pelatihan belum menyeluruh, aspek dukungan penerapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan akuntansi belum mencukupi. 3. Hasil laporan realisasi belanja modal yang dihasilkan Simda Keuangan pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu belum memadai atau belum terinci.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021). “Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan”. Siaran Pers 16 Desember 2021. Jakarta
- Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. (2013). “Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah”. *Jurnal WRA*. Volume 1. Nomor 1.
- Darman, Syarif. (2015) *Kinerja Keuangan Daerah*. (diakses tanggal 23 Desember 2021) (<http://theorykeuangandaerah.blogspot.co.id>)
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Soleha, Nurhayati. (2014). “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten”. *Jurnal Ekonomi*. Volume 13 No. 1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta